



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU

Jln. Prof. Moh. Yamin NO. 51, Telp. (0451) 425088; Fax.(0451) 425088; Email : bphp12.palu@gmail.com

PALU - 94124

30 Maret 2023

Nomor : UN. 678/BPHL.XII/SBTU/03/2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Pembahasan Perencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.

- Yth. 1. Kepala Balai
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi PEPHPL
4. Kepala Seksi P3HPHL
5. Seluruh Pegawai BPHL Wilayah XII Palu

Dalam rangka Rapat Pembahasan Perencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu, bersama ini kami mengundang agar saudara dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Kamis , 30 Maret 2023
Waktu : 14.00 WITA s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat BPHL Wilayah XII Palu
Acara : Rapat Pembahasan Perencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Pih Kepala Balai,



Pragowo Soran, S.Hut.,M.Si
NIP. 197504131997031003

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU**

Jln. Prof. Moh. Yamin NO. 51, Telp. (0451) 425088; Fax. (0451) 425088; Email : bphp12.palu@gmail.com

PALU - 94124

**ABSENSI RAPAT PEMBAHASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU**

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Maret 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Elbrus	KRM	
	Ade Satrio	KRM	
	Plughelmo Seran.	Kafite	
	Cornelia Herna Paru	Staff	
	Achmad Pardoko	keosi PEPHAPIL	
	Apriani	TU	
	Haryono	PEH Madya	
	SAPRIANSYAH	PPNPN	
	Aprianti	pengelola beryangair	
	Azi	PEH penyelenggara	
	Blu kharudin	PEH Madya	
	Ichsan	PEH muda	
	Purwanto	PEH Pertama	
	Ilsye Janet Amalia	PEH Pertama	
	Danegra k. Sereny	PPNPN	
	Juan Diansius Agusno	PEH Pemula	
	Orpa	PEH Pertama	
	Ferdi Ferdiansyan	PEH Pemula	
	PUTRI MABRIDAT	PEH TERAMPIL	
	Cornelia H. p	PEH Muda	
	Meriam Septiani	Analisis Perencanaan & Evaluasi	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Winda Gantika	Aspirans ferampir	
	Yongker P.	PEH PENYELIA	
	Himawan Juco R.	PEH PERALISMAN	
	Albertus Sinda	Staf TU	
	Jony. J. Widan	TU	
	SABR,	TU	
	Suleman	TU	
	Asnir. RL.	Staf TU	
	Taufik Hidayat	Staf TU	
	IZRAH	-	
	Andika Aprial S.	-	
	FIRDAUS	-	
	MUBRI TADt	TU	
	Abdul Rahm	TU	
	Adnin Aultra		
	Faiy Syae Fadin		
	MUH. MUFTI A		

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Tatat Usaha

Ade Sutaji

Ade Sutaji, S.Sos., M.E.
NIP. 19741221 199403 1 001

NOTULEN

Judul	:	Rapat Pembahasan Perencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) BPHL Wilayah XII Palu.
Waktu Pelaksanaan	:	Rabu, 30 Maret 2023 / 14.00 – 15.30 WITA
Tempat	:	Ruang Rapat Kantor BPHL Wil XII
Pimpinan Rapat	:	Ka Balai (Bapak Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.)
Peserta Rapat	:	Struktural dan Seluruh Pegawai BPHL Wil XII

Pembukaan : Rapat Pembahasan Perencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) BPHL Wilayah XII Palu dibuka oleh Ka Balai, Bapak Elbakti, S.Hut.T., M.Sc

Pembahasan :

1. Dasar Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integrita Menuju Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
2. Maksud dan Tujuan Rencana kerja pembangunan yang di maksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan BPHP Wilayah XII Palu.
3. Sehubungan dengan telah dicanangkannya pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) lingkup UPT KLHK yang Provinsi Sulawesi Tengah maka Tim pokja yang telah ditetapkan oleh Kapala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu agar segera menindaklanjuti dengan diawali menyiapkan dokumen rencana kerja.

4. Pokja menyiapkan rencana aksi, target prioritas dan uraian bukti dokumen sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan saling berkoordinasi karena adanya keterkaitan antar komponen.
5. Kegiatan evaluasi progres pelaksanaan pembangunan Zona Integritas direncanakan dilaksanakan setiap bulan pada tahun berjalan.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Pimpinan Rapat,

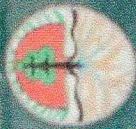
Elbakti S.Hut.T., M.Sc
NIP. 19740504 199301 1 001

Notulis Rapat

Cornelia H., S.Hut., M.P.
NIP. 19790107 200801 2 001







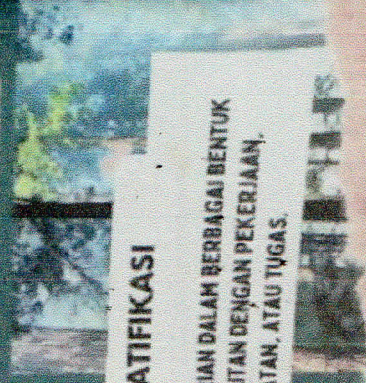
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII

STOP PUNGGLI DAN GRATIFIKASI



PUNGGLI

TINDAKAN MEMINTA SESUATU BERUPA UANG
DAN LAIN SEBAGAINYA KEPADA SESEORANG,
LEMBAGA ATAU PUN PERUSAHAAN TANPA
MENURUTI PERATURAN YANG LAZIM.



GRATIFIKASI

SEBUAH PEMBERIAN DALAM BERBAGAI BENTUK
YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN,
JABATAN, ATAU TUGAS.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2018.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK
adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan
korupsi yang sebagai acuan Kementerian, lembaga pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi Indonesia

1. Pegawai harus jujur menyampaikan informasi dan data.

